

Peran Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi Bagi Mahasiswa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Nabilah Fauziyah^{a,1*}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ nabilahfauziyah@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 15 Agustus 2024;

Revised: 22 Agustus 2024;

Accepted: 9 September 2024.

Kata-kata kunci:

Pendidikan Politik;

Partisipasi Politik;

Kesadaran Politik;

Mahasiswa.

: ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada peran pendidikan politik di perguruan tinggi dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik mahasiswa. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meninjau secara mendalam kontribusi pendidikan politik dalam mendorong peningkatan partisipasi politik mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan desain pembatasan silang (*cross-sectional design*). Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, dan data dikumpulkan melalui kuisioner yang didistribusikan secara daring menggunakan Google Forms. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas politik. Melalui pendidikan politik, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika politik yang terjadi di sekitar mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik mereka. Penelitian ini memberikan implikasi bagi pengembangan kurikulum di perguruan tinggi yang menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan. Temuan ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi upaya peningkatan partisipasi politik generasi muda di Indonesia.

ABSTRACT

Keywords:

Political Education;

Political Participation;

Political Awareness;

Students.

The Role of Political Education in Higher Education for Students in Increasing Political Participation. *This study focuses on the role of political education in higher education in enhancing students' political awareness and participation. The primary aim of this research is to examine in-depth the contribution of political education in promoting increased political participation among university students. The research employs a survey method with a cross-sectional design. The participants of this study are students from the Civic Education Study Program at the Universitas Pendidikan Indonesia, and data were collected through questionnaires distributed online using Google Forms. The findings indicate that political education plays a significant role in enhancing political awareness and encouraging student engagement in political activities. Through political education, students gain a better understanding of the political dynamics around them, ultimately increasing their political awareness and participation. This study provides implications for the development of higher education curricula that emphasize the importance of political education as an integral part of civic education. The findings are also expected to serve as a foundation for efforts to improve political participation among the younger generation in Indonesia.*

Copyright © 2024 (Nabilah Fauziyah). All Right Reserved

How to Cite : Fauziyah, N. (2024). Peran Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi Bagi Mahasiswa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(10), 343–352. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i10.2489>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Dilansir Kompas.com pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 hanya sebanyak 158.012.506 dari 199.987.870. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 41.975.364 pemilih yang tidak berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Dilansir CNN, kelompok milenial yang tidak menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 diprediksi mencapai angka di atas 40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak generasi muda termasuk mahasiswa yang tidak berpartisipasi politik pada Pemilu 2019.

Mahasiswa sebagai generasi muda sudah seharusnya menjadi penggerak perubahan dan ikut membangun bangsa. Saat ini kesadaran politik mahasiswa dirasa masing kurang, sehingga tak sedikit mahasiswa yang tidak melibatkan diri dalam partisipasi politik dan bela negara (Anggraeni et al., 2022). Hal ini terlihat pada sebagian mahasiswa bersikap apatis terhadap perkembangan politik di Indonesia. Tak hanya bersikap apatis, namun masih terdapat Sebagian mahasiswa yang tidak berpartisipasi aktif dalam politik seperti memberikan hak suaranya dalam pemilu ataupun pilkada. Tak sedikit mahasiswa yang melakukan golput karena tidak peduli akan nasib bangsanya sendiri untuk kedepannya. Mengingat pentingnya partisipasi mahasiswa dalam politik di negaranya sendiri, maka sikap acuh tak acuh mahasiswa perlu dikurangi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negaranya sendiri.

Sikap apatis yang ada dalam diri mahasiswa memiliki dampak yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dampak ini membawa lebih banyak dampak negatif daripada positif. Bayangkan jika ketidakpedulian terus dipertahankan dengan segala efek yang ditimbulkannya. Jika seperti ini bagaimana dengan nasib bangsa dan bagaimana bangsa kita akan maju jika generasi mudanya tidak peduli akan nasib bangsanya sendiri. Dengan demikian, perlu diadakannya pendidikan berbasis digital politik demi meningkatkan partisipasi politik pada mahasiswa (Anggraeni et al., 2021).

Menurut Handayono & Lestari, (2017), pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang berkepribadian politik, agar memiliki kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara (Rahman & Suharno, 2019). Pendidikan Politik dapat diartikan sebagai bentuk pendidikan intensional dan sistematis untuk mempengaruhi individu, agar dapat lebih efektif dan berpartisipasi aktif dalam perjuangan politik, dan memiliki tanggung jawab etis yang tinggi dalam setiap kegiatan politiknya (Sukarno, 2011).

Rakyat memerlukan pendidikan politik untuk mencapai tujuan sosial ekonomi dan tujuan-tujuan politik tertentu, agar rakyat dapat memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai warganegara dan bisa berperan serta secara politik (Sukarno, 2011). Pendidikan politik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diberikan agar generasi muda tidak mendapatkan pemahaman yang salah tentang politik (Rahman & Suharno, 2019). Menurut Sastroatmodjo (1995) dikutip oleh Rahman, A., dan Suharno bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pada masyarakat maka semakin tinggi juga kesadaran politiknya (Rahman & Suharno, 2019). Menurut Wuryan & Syaifullah (2008), pendidikan politik sangat penting untuk membangun kesadaran warganegara untuk memiliki kemampuan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat (Rahman & Suharno, 2019).

Pendidikan politik menjadi suatu keharusan untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas di bangsa ini, karena akan membantu memberikan pemahaman terhadap peristiwa politik sehingga muncul kesadaran politik dan partisipasi politik (Supratiwi et al., 2021). Menurut Handoyono & Leastari (2017), pendidikan politik bertujuan untuk membuat rakyat menjadi melek politik, lebih kreatif, dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuk positif (Rahman & Suharno, 2019). Sedangkan, Ramdlon Naning (1982) dan Kartini Kartono (2009) secara khusus menyatakan tujuan pendidikan politik di Indonesia untuk generasi mudanya, sebagai berikut: 1). Membangun generasi muda Indonesia yang melek politik, melek akan hak dan kewajiban politiknya selaku warga negara, di samping melek akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang harus terus menerus membangun; 2). Membangun orang muda menjadi manusia Indonesia

seutuhnya, yang perwujudannya tercermin dalam seluruh watak atau karakteristik kepribadian Indonesia (tidak lupa jati dirinya); 3). Meningkatkan partisipasi aktif, kreatif dan dinamis generasi muda dalam kehidupan bernegara, berbangsa serta dalam politik nasional (Suardi & Nasution, 2019).

Perguruan tinggi menjadi salah satu institusi pendidikan yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota yang baik dalam masyarakat (Angkawijaya, 2017). Tanggung jawab perguruan tinggi tersebut terdapat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Menurut Ali (2009) berkata bahwa dalam kaitannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terdapat tiga fungsi utama perguruan tinggi, yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan sains dan teknologi, dan sebagai agen perubahan sosial (Angkawijaya, 2017).

Miriam Budiardjo (2008:367), sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy) (Kharisma, 2015). Menurut Herbert Mc Closky, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam pembentukan kebijakan umum (Kharisma, 2015).

Menurut Ramlan Subakti, Partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang mempengaruhi proses pembentukan dan implementasi kebijakan publik, serta dalam menentukan pemimpin pemerintahan (Kharisma, 2015). Rendahnya pemahaman kritis warga negara terhadap isu-isu politik seringkali disertai menurunnya partisipasi publik dalam proses-proses politik (Bashori, 2018). Menurut Gabriel Almond partisipasi politik terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni secara Konvensional dan Non Konvensional. Yang termasuk dalam bentuk konvensional adalah partisipasi politik seperti Pemberian suara (voting), mengikuti diskusi politik, mengikuti kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, melakukan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. Sedangkan yang masuk dalam bentuk non konvensional adalah membuat dan mengajukan petisi, melakukan demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekeasan terhadap harta benda (Kharisma, 2015).

Mahasiswa merupakan salah satu elemen perubahan sosial, sesuai dengan peranan mahasiswa dalam masyarakat yaitu sebagai *Agent of Change*, *Social Control*, dan *Iron Stock*. Selain itu, Nahrowi juga menambahkan terdapat dua peran lain yang dimiliki mahasiswa, yakni peran mahasiswa sebagai *Political Control* dan *Guardian of Value* (Sutiyoso et al., 2022). Peran mahasiswa sebagai *Political Control* yakni sebagai pengontrol dan pengawas setiap kebijakan pemerintah. Peran mahasiswa sebagai *Guardian of Value* yakni sebagai penjaga nilai-nilai luhur bangsa. Salah satu komponen terpenting dalam masyarakat yang dapat berperan lebih bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia adalah pemuda dan mahasiswa (Martadinata, 2019). Peran pemuda dimuat dalam UU RI No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan berbunyi bahwa pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional (Suardi & Nasution, 2019). Generasi muda memiliki andil/bagian besar dalam melanjutkan kepemimpinan pada masa yang akan datang dan baik atau buruknya nasib suatu bangsa bergantung pada kualitas para generasi mudanya (Rahman & Suharno, 2019).

Dengan demikian, rumusan masalah yang akan saya kaji dalam penelitian ini yaitu: 1). Seperti apa keadaan partisipasi politik mahasiswa di lingkungan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI saat ini; 2). Apakah partisipasi politik mahasiswa masih dibutuhkan; dan 3). Mengapa pendidikan politik di perguruan tinggi penting.

Partisipasi politik mahasiswa di lingkungan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan menurun. Partisipasi politik mahasiswa sangat penting untuk dipertahankan karena sangat dibutuhkan demi berjalannya perkembangan politik bangsa dengan baik. Selain itu, pendidikan politik menjadi

suatu hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada mahasiswa agar mahasiswa memahami jalannya politik dan ikut berpartisipasi politik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran penting dari pendidikan politik di perguruan tinggi bagi mahasiswa dalam meningkatkan partisipasi politik dan mengetahui keadaan partisipasi mahasiswa saat ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif untuk mengumpulkan data primer melalui pengisian kuisioner oleh responden. Metode survei merupakan kegiatan yang umum dilakukan dalam penelitian dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Penelitian ini mengadopsi desain pembatasan silang (*Cross Sectional Desain*) yang memungkinkan pengumpulan data pada satu waktu terhadap sampel yang mewakili populasi yang besar. Desain ini dipilih untuk mengukur peran pendidikan politik di perguruan tinggi bagi mahasiswa dengan waktu yang singkat. Partisipan penelitian terdiri dari sekitar 30 mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner berbentuk Google Form yang memuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini melibatkan langkah-langkah seperti penetapan masalah penelitian, pembuatan kuisioner, penyebaran kuisioner kepada responden, pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, dan analisis data. Analisis data akan dilakukan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Dengan demikian, metode survei ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran pendidikan politik bagi mahasiswa dalam meningkatkan partisipasi politik mereka.

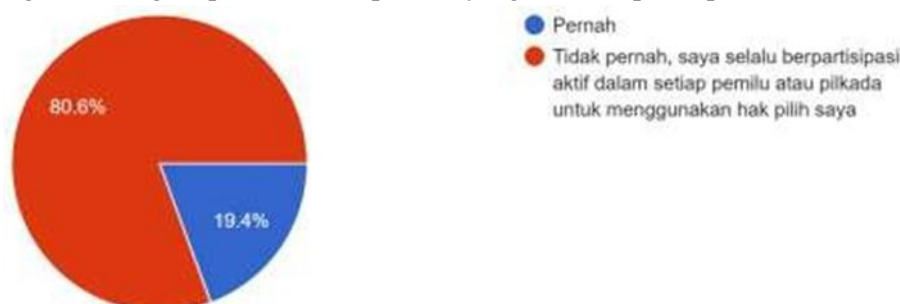
Hasil dan pembahasan

Berdasarkan diagram 1, tingkat jawaban responden paling tinggi 96,8% menyatakan bahwa mereka selalu ikut berpartisipasi politik dalam setiap pemilu atau pilkada yang di selenggarakan oleh KPU. Namun, disisi lain 3,2% responden menyatakan bahwa tidak setiap pemilu atau pilkada mereka memberikan partisipasi politik untuk memberikan hak suara.

Diagram 1. Tingkat presentase responden yang telah melakukan partisipasi politik pada Pemilu atau Pilkada



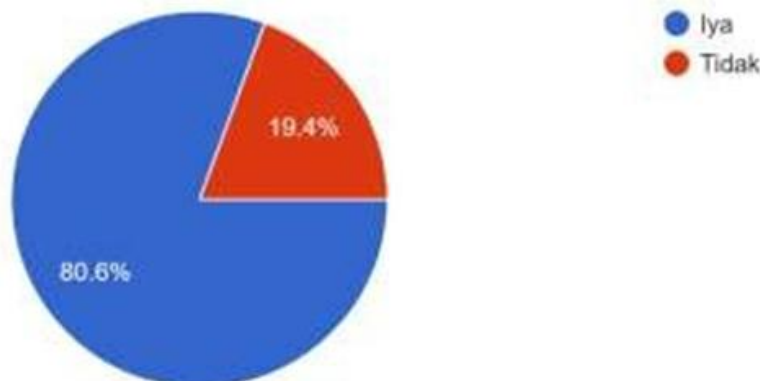
Diagram 2. tingkat presentase responden yang tidak berpartisipasi dalam Pemilu



Berdasarkan hasil data di atas, tingkat jawaban responden paling tinggi 80,6% menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan golput dan selalu berpartisipasi aktif dalam setiap pemilu atau

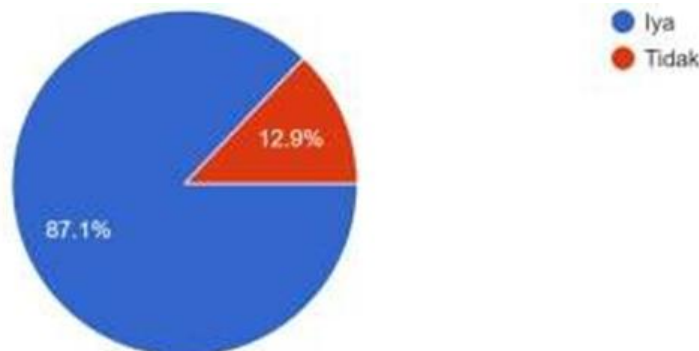
pilkada untuk menggunakan hak pilih. Di sisi lain 19,4% menyatakan bahwa mereka pernah melakukan golput dalam pemilu.

Diagram 3. tingkat presentase responden yang mengikuti perkembangan politik



Berdasarkan hasil data di atas, tingkat jawaban responden paling tinggi 80% menyatakan bahwa mereka suka menonton atau melihat berita tentang politik. Namun, di sisi lain 19,4 % menyatakan bahwa mereka tidak suka menonton berita tentang politik.

Diagram 4. tingkat presentase responden yang peduli terhadap perkembangan politik



Berdasarkan hasil data di atas, tingkat jawaban responden paling tinggi 87,1% menyatakan bahwa mereka peduli dengan jalannya perkembangan politik di Indonesia saat ini. Di sisi lain 12,9% menyatakan bahwa mereka tidak peduli dengan perkembangan politik Indonesia saat ini.

Berdasarkan presentase responden diagram 1,2,3, dan 4 sesuai dengan teori sebelumnya yaitu salah satu komponen terpenting dalam masyarakat yang dapat berperan lebih bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia adalah pemuda dan mahasiswa (Martadinata, 2019). Melihat data presentase keempat diagram di atas partisipasi politik mahasiswa sudah termasuk tinggi. namun, sangat disayangkan bagaimana akan ada pembangunan dan kemajuan bangsa apabila masih terdapat beberapa mahasiswa yang tidak melek politik dan tidak berpartisipasi politik pada pemilu atau pilkada. Pada diagram 1 terdapat 3,2% yang tidak memberikan hak suara pada setiap pemilu atau pilkada, artinya dari 31 orang terdapat 1 orang yang masih tidak berpartisipasi politik dalam pemilu. Di sisi lain terdapat 19,4% sekitar 6 orang dari 30 orang melakukan golput saat pemilu berlangsung. Tentunya hal ini sangat disayangkan apabila responden tersebut tidak melek akan politik dan tidak peduli dengan nasib bangsanya sendiri kedepannya. Sehingga bagaimana kebijakan pemerintah dan nasib bangsa dapat menjadi lebih baik dan maju jika para generasi mudanya tidak ikut berpartisipasi politik. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Ramlan Subakti, bahwa Partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang mempengaruhi proses pembentukan dan implementasi kebijakan publik, serta dalam menentukan pemimpin pemerintahan (Kharisma, 2015).

Terdapat 19,4% mahasiswa yang tidak tertarik menonton berita tentang politik dan 12,9% mahasiswa tidak peduli dengan perkembangan politik bangsanya sendiri. Lalu bagaimana mereka dapat berpartisipasi politik dengan baik apabila tidak mengikuti perkembangan politik bangsanya sendiri. Kurangnya pemahaman tentang isu-isu politik dan kegiatan politik bisa menyebabkan mahasiswa menjadi apatis terhadap berbagai proses demokrasi dan dinamika politik bangsanya. Sikap apatis ini merupakan sikap yang tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kegiatan politik dan bersikap masa bodoh sehingga lebih mementingkan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan teori Bashori yakni rendahnya pemahaman kritis warga negara terhadap isu-isu politik seringkali disertai menurunnya partisipasi publik dalam proses-proses politik (Bashori, 2018). Sesuai dengan teori Martadinata bahwa salah satu komponen terpenting dalam masyarakat yang dapat berperan lebih bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia adalah pemuda dan mahasiswa (Martadinata, 2019). Jadi sudah sepatutnya kita mahasiswa sebagai generasi muda tidak hanya sekedar memikirkan kepentingan akademis saja melainkan harus mementingkan pula kualitas hidup pribadi yang mampu mengabdikan kepada masyarakat. Dengan berpartisipasi politik maka sama dengan kita menentukan nasib kemajuan bangsa dan menentukan bagaimana nasib hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Rahman dan Suharno bahwa, generasi muda memiliki andil/bagian besar dalam melanjutkan kepemimpinan pada masa yang akan datang dan baik atau buruknya nasib suatu bangsa bergantung pada kualitas para generasi mudanya (Rahman & Suharno, 2019).

Dengan demikian, berdasarkan data dan hasil analisis partisipasi politik Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia termasuk tergolong ke dalam partisipasi yang tinggi. Namun, masih terdapat beberapa mahasiswa yang masih belum melek politik dan apatis sehingga partisipasi politiknya perlu lebih ditingkatkan lagi.

Diagram 5. tingkat presentase responden yang berpendapat bahwa partisipasi politik penting



Berdasarkan hasil data di atas, tingkat jawaban responden paling tinggi 96,8% menyatakan bahwa pentingnya partisipasi politik dari mahasiswa. Sedangkan, di sisi lain 3,2% menyatakan bahwa partisipasi politik dari mahasiswa itu tidak penting.

Diagram 6. Tingkat presentase responden yang berpendapat bahwa partisipasi politik berpengaruh pada kondisi perpolitikan di Indonesia

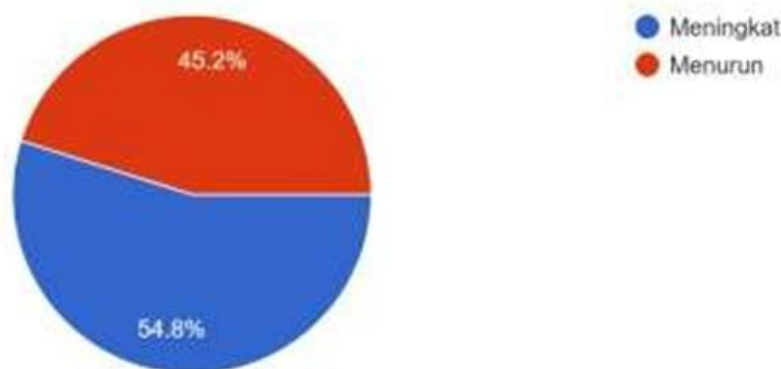


Berdasarkan hasil data di atas, tingkat jawaban responden paling tinggi 100% menyatakan bahwa partisipasi politik dari mahasiswa berpengaruh pada jalannya perpolitikan di Indonesia.

Berdasarkan presentase diagram 5 dan 6 diperoleh bahwa partisipasi politik mahasiswa penting untuk dipertahankan karena partisipasi politik mahasiswa akan sangat berpengaruh pada kondisi perpolitikan di Indonesia. Bahkan, partisipasi mahasiswa dapat mempengaruhi kebijakan politik dalam negara. Mahasiswa merupakan salah satu elemen perubahan sosial, sesuai dengan peranan mahasiswa dalam masyarakat yaitu sebagai Agent of Change, Social Control, dan Iron Stock. Selain itu, Nahrowi juga menambahkan terdapat dua peran lain yang dimiliki mahasiswa, yakni peran mahasiswa sebagai Political Control dan Guardian of Value (Sutiyoso et al., 2022). Peran mahasiswa sebagai Political Control yakni sebagai pengontrol dan pengawas setiap kebijakan pemerintah. Peran mahasiswa sebagai Guardian of Value yakni sebagai penjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sejalan dengan teori Martadinata yaitu salah satu komponen terpenting dalam masyarakat yang dapat berperan lebih bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia adalah pemuda dan mahasiswa (Martadinata, 2019). Hal ini dikarenakan mahasiswa dianggap memiliki wawasan dan pengetahuan yang jauh lebih luas sehingga mempunyai pemikiran yang kritis dan terbuka. Mahasiswa telah dianggap selalu memiliki ide- ide cemerlang, pemikiran kreatif yang out of the box sehingga dapat membawa perubahan baik bagi bangsanya. Oleh karena itu, inilah yang membuat kemungkinan bahwa mahasiswa dapat mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sekaligus mengubah nasib bangsanya menjadi lebih maju. Selain itu, peran pemuda juga dimuat dalam UU RI No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan berbunyi bahwa pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional (Suardi & Nasution, 2019). Generasi muda memiliki andil/bagian besar dalam melanjutkan kepemimpinan pada masa yang akan datang dan baik atau buruknya nasib suatu bangsa bergantung pada kualitas para generasi mudanya (Rahman & Suharno, 2019). Untuk melanjutkan keberlangsungan kepemimpinan yang dapat membawa nasib baik bagi suatu bangsa diperlukan kualitas diri dari para mahasiswa untuk mengubah nasib bangsa menjadi lebih merdeka dan maju dan sehat jasmani (Paramitha et al., 2021).

Dengan demikian, partisipasi politik mahasiswa sangat penting karena mahasiswa sebagai generasi muda memiliki andil dalam menentukan nasib bangsanya serta mahasiswa juga merupakan generasi penerus yang akan memimpin bangsanya sendiri. Selain itu, pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat termasuk mahasiswa agar pembangunan yang dilakukan dapat terarah dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat, di sisi lain pemerintah dapat mengetahui bagaimana keberhasilan dari pembangunan tersebut. Maka dari itu diharapkan mahasiswa bukan hanya sebagai pengamat saja, namun mahasiswa dituntut sebagai pelaku masyarakat yang perlu memberikan partisipasi politiknya. Sudah bukan waktunya lagi mahasiswa hanya sekedar untuk menjadi pelaku pasif yang hanya diam melihat perubahan sosial saat ini, tetapi mahasiswa harus memberikan pola perubahan dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

Diagram 7. tingkat presentase responden kesadaran politik mahasiswa



Berdasarkan hasil data di atas, tingkat jawaban responden yang paling tinggi 54,8% menyatakan bahwa kesadaran politik mahasiswa saat ini meningkat. Namun, di sisi lain menyatakan sebaliknya 45,2% responden menyatakan bahwa kesadaran politik mahasiswa saat ini menurun.

Diagram 8. tingkat presentase responden pendapat pentingnya pendidikan politik



Berdasarkan hasil data di atas, tingkat jawaban responden paling tinggi 96,8% menyatakan bahwa pendidikan politik di perguruan tinggi sangat penting. Di sisi lain 3,2% responden menyatakan bahwa pendidikan politik di perguruan tinggi tidak penting.

Berdasarkan presentase diagram 7 dan 8 diperoleh bahwa pendidikan politik di perguruan tinggi penting untuk diajarkan kepada mahasiswa agar kesadaran politik dan partisipasi politik mahasiswa dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan teori menurut Wuryan & Syaifullah (2008), pendidikan politik sangat penting untuk membangun kesadaran warga negara untuk memiliki kemampuan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat (Rahman & Suharno, 2019). Mahasiswa sebagai Political Control memiliki tugas untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan politik. Sejalan dengan teori Martadinata salah satu komponen terpenting dalam masyarakat yang dapat berperan lebih bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia adalah pemuda dan mahasiswa (Martadinata, 2019). Pendidikan politik yang lemah dapat menyebabkan para mahasiswa sebagai generasi muda hanya sekedar ikut-ikutan dan dengan mudah serta rentan dimobilisasi oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga partisipasi politiknya tidak maksimal. Hal ini sejalan dengan teori Bashori bahwa rendahnya pemahaman kritis warga negara terhadap isu-isu politik seringkali disertai menurunnya partisipasi publik dalam proses-proses politik (Bashori, 2018). Hal ini dikarenakan partisipasi politik yang dilakukan oleh warganegara harus di dasari adanya kesadaran politik, sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran politik tersebut diperlukan pendidikan politik. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai salah satu partisipasi politik perlu memahami terlebih dahulu seluk beluk dan dinamika politik bangsanya. Maka dari itu pendidikan politik menjadi suatu keharusan untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas di bangsa ini, karena akan membantu memberikan pemahaman terhadap peristiwa politik sehingga muncul kesadaran politik dan partisipasi politik (Supratiwi et al., 2021).

Dengan diajarkannya pendidikan politik pada mahasiswa diharapkan mahasiswa dapat sadar akan politik, peduli dan ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Menurut Handoyono & Leastari (2017), pendidikan politik bertujuan untuk membuat rakyat menjadi melek politik, lebih kreatif, dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuk positif (Rahman & Suharno, 2019). Perguruan tinggi menjadi salah satu institusi pendidikan yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota yang baik dalam masyarakat (Angkawijaya, 2017). Tanggung jawab perguruan tinggi tersebut terdapat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Menurut Ali (2009) berkata bahwa dalam kaitannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terdapat tiga fungsi utama perguruan tinggi, yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan sains dan teknologi, dan sebagai agen perubahan sosial (Angkawijaya, 2017). Maka, di sini mahasiswa bukan hanya sekedar memikirkan kepentingan dari akademis saja melainkan mementingkan kualitas hidup pribadi demi

mampu mengabdikan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan mahasiswa dapat menjalankan perannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Ramdlon Naning (1982) dan Kartini Kartono (2009) secara khusus menyatakan tujuan pendidikan politik di Indonesia untuk generasi mudanya, sebagai berikut: 1). Membangun generasi muda Indonesia yang melek politik, melek akan hak dan kewajiban politiknya selaku warga negara, di samping melek akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang harus terus menerus dibangun; 2). Membangun orang muda menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang perwujudannya tercermin dalam seluruh watak atau karakteristik kepribadian Indonesia (tidak lupa jati dirinya); 3). Meningkatkan partisipasi aktif, kreatif dan dinamis generasi muda dalam kehidupan bernegara, berbangsa serta dalam politik nasional (Suardi & Nasution, 2019). Dengan begitu, diharapkan tujuan pendidikan politik tersebut dapat merubah pola pikir dan sudut pandang mahasiswa dalam perubahan dan sadar akan pentingnya peranan mahasiswa dalam pembangunan politik. Dengan demikian, pendidikan politik memiliki peranan yang sangat penting di perguruan tinggi bagi mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik. Dengan pendidikan politik mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dinamika politik yang berkembang. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan negara maka pendidikan politik sangat penting dan kebutuhan yang harus dipenuhi dan dilakukan. Dengan memiliki wawasan dan pengetahuan yang jauh lebih luas, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis dan terbuka sehingga membawa perubahan yang bermakna bagi bangsa (Malihah et al., 2020).

Simpulan

Partisipasi politik mahasiswa sangat penting karena mahasiswa sebagai generasi muda memiliki andil dalam menentukan nasib bangsanya serta mahasiswa juga merupakan generasi penerus yang akan memimpin bangsanya sendiri. Dengan demikian, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik mahasiswa perlu diadakannya pendidikan politik di perguruan tinggi. Pelaksanaan pendidikan politik melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran politik mahasiswa. Untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan negara maka pendidikan politik sangat penting dan kebutuhan yang harus dipenuhi dan dilakukan. Dengan memiliki wawasan dan pengetahuan yang jauh lebih luas, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis dan terbuka sehingga membawa perubahan yang bermakna bagi bangsa.

Referensi

- Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survei sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law & Governance Journal*, 697-709.
- Anggraeni, L., Anggraeni, L., Affandi, I., Wahyudin, D., Paramitha, S. T., & Gilang, M. (2022). *Optimization of the Board Game as a Platform for the Concept of Peace Education : A Survey Method Study To cite this article : method study . International Journal of Education in Mathematics , Science , and Technology Optimization of the Board Game as a .*
- Anggraeni, L., Darmawan, C., Tanszil, S. W., & Jubaedah, E. (2021). Promoting Ksatria Bela Negara comic through the Webtoon for the prevention and control Covid-19. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 138–147. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.39377>
- Angkawijaya, Y. F. (2017). Peran Perguruan Tinggi sebagai Agen Perubahan Moral Bangsa (Studi Kasus Peran Konsep Diri terhadap Karakter Mulia pada Mahasiswa di Universitas X Surabaya). *WIDYAKALA JOURNAL*, 4(1), 36. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v4i1.29>
- Anonim. (2019). Survei Pemilu: Milenial Golput Diprediksi di Atas 40 Persen. [online]. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190404174723-32-383507/survei-pemilu-milenial-golput-diprediksi-di-atas-40-persen>
- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287– 310. <https://doi.org/10.32533/02207.2018>
- Farisa, F. C. (2019). KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 persen. [online]. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi>

- pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen
- Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7).
- Malihah, E., Nurbayani, S., & Anggraeni, L. (2020). Why is There Zero Women Candidate for Governor Election in West Java, Indonesia? *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.21373>
- Martadinata, A. M. (2019). Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan Di Indonesia. *Idea*, 2655–3139.
- Rahman, A., & Suharno. (2019). Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 282–290.
- Paramitha, S. T., Hasan, M. F., Anggraeni, L., Noviyanti, M., Iلسya, F., Gilang Ramadhan, M., Maharani, A., & Kodrat, H. (2021). Analysis and evaluation of law number 12 of 2012 concerning higher education based on sports needs for students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 191–199. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/42249>
- Suardi, & Nasution, U. H. (2019). Peran Pendidikan Politik Pada Generasi Milenial Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Bisnis*, 2(2).
- Sukarno, B. (2011). Pendidikan Politik alam Demokratisasi. *Widya Wacana: Jurnal Ilmiah*, 7(1).
- Supratiwi, Herawati, N. R., Harsastro, P., Fitriyah, Marlina, N., & Iskandar, D. (2021). Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pilkada Serentak. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 02(01), 5–9.
- Sutiyo, B. S., Prihantika, I., Saputra, P. R., Fitriani, Y., & Destrilia, I. (2022). Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan Politik Di Era Society 5.0 Dan Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).